

MEMAHAMI PLURALITAS KEMANUSIAAN DALAM PANDANGAN AXEL HONNETH DAN Y.B. MANGUNWIJAYA

Alexius Nale ^{a,1}

^a Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma-Yogyakarta

¹ alexiusnale@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted : 11-06-2024
Accepted : 09-09-2024

Keywords:

Plurality,
Humanity,
Alex Honneth,
Mangunwijaya

ABSTRACT

Indonesia's rich tapestry of religion, culture, tribe, race, and ethnicity has led to a diverse and pluralistic society. However, over time, this diversity has been scrutinized, and instances of radicalism and violence in the name of religion and belief have become more frequent. To address these issues, the perspectives of Axel Honneth and Y.B. Mangunwijaya offer valuable insights into fostering humanitarian attitudes through the adaptation process. This study employs literature review and comparative analysis methods. Findings indicate that embracing plurality with a focus on human values is crucial for cultivating personal awareness of individual dignity. This awareness is essential for bridging divides and dismantling barriers that threaten national unity. Continuous conflict will persist if differences are always viewed with suspicion rather than as a source of richness. As Mangunwijaya noted, a nation cannot mature if it perceives differences as problems rather than assets. To advance towards a mature society, human values must underpin religious teachings, as this is the path to unity and peace. Similarly, Axel Honneth emphasizes the importance of recognition in overcoming social injustices and achieving liberation.

ABSTRAK

Kehadiran agama, budaya, suku, ras, dan etnis di Indonesia telah menghasilkan keragaman dan pluralitas kehidupan berbangsa. Namun seiring berjalannya waktu, keragaman dan pluralitas itu dipertanyakan, manakala radikalisme dan kekerasan dengan mudahnya terjadi atas nama agama dan kepercayaan. Isu-isu tersebut bisa ditanggapi dengan pemikiran Axel Honneth dan Romo Mangunwijaya yang pada pokoknya menawarkan perspektif solutif terkait proses adaptasi demi membangun sikap kemanusiaan. Untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pluralitas perlu disikapi dengan keutamaan nilai kemanusiaan untuk menumbuhkan kesadaran pribadi akan harkat dan martabat hidup setiap orang. Kesadaran ini menjadi kunci untuk menjembatani 'jarak' dan merobohkan 'sekat' ataupun 'tembok' yang seringkali menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa ini akan terus berada dalam konflik apabila perbedaan selalu dipersoalkan demi mencari kebenaran. Seperti yang dikatakan Romo Mangunwijaya, negara ini tidak akan dewasa jika perbedaan dilihat sebagai masalah dan bukan sebagai kekayaan. Oleh karena itu, dalam menuju negara yang dewasa, nilai kemanusiaan harus menjadi dasar ajaran bagi setiap agama karena hanya inilah yang mampu membawa kita pada persatuan dan kedamaian. Dalam nada yang sama dengan menekankan aspek kemanusiaan, Axel Honneth pun hadir dengan konsepnya tentang pengakuan. Di sini Honneth mau menunjukkan betapa pentingnya aspek pengakuan dalam upaya kemerdekaan – mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan yang menimpa manusia sebagai subjek dalam tatanan sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki ideologi untuk merangkul pluralitas dan multikulturalitas, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Pengakuan tersebut secara konstitusional termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Prinsip dasar masyarakat yang bernaung dalam keanekaragaman, adalah bahwa sejatinya segala entitas perbedaan harus dihargai, dipahami, dan diakui sebagai sebuah realitas eksistensial dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia dibangun atas sebuah ideologi Pancasila. Ideologi tersebut memuat pilar-pilar fundamental yang berkaitan dengan nilai ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan (nasionalisme), permusyawaratan dan keadilan sosial.

Salah satu isu krusial tentang sekularisasi dan totalitas manusia dalam beragama, membawa gejolak yang tidak terbendung semisal dalam dunia politik, ekonomi, bahkan bidang

kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, hampir bisa dikatakan bahwa pengaruh agama sangat besar dan meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Konsistensi agama yang seringkali tampil dengan dua wajah yang berbeda sama sekali, antara wajah ajaran kebaikan, keharmonisan, egaliter dengan wajah potensi penafsiran yang mengarah pada dominasi, diskriminasi, dan kekerasan.¹ Oleh karena itu, setiap orang cenderung menampilkan dua wajah dalam beragama yang sulit dibedakan. Dengan balutan dominasi dan eksistensinya, agama menjadi tolok ukur antara kelompok yang satu dengan kelompok lain. Hal inilah yang melahirkan sikap diskriminasi, iri hati, serta pengucilan terhadap keyakinan orang lain, dan hingga kini banyak kasus intoleransi yang dilatarbelakangi oleh hegemoni agama.

Realitas bangsa Indonesia yang plural ini ternyata mengundang sekap yang beragam semisal eksklusifitas yang mendorong masing-masing orang menutup diri dan cenderung bertindak fundamentalis. Berangkat dari fenomena demikian, kebutuhan yang hendak dipenuhi dalam masyarakat multikultural itu bukan hanya bersifat material yang bernuansa ekonomis, tetapi juga menyelip kebutuhan eksistensial berupa aktualisasi diri. Konflik sosial atau gerakan-gerakan fundamentalis dalam masyarakat multikultural sering terjadi karena ada pihak tertentu yang mengalami defisit pengakuan diri di tengah sosial masyarakat. Ledakan konflik yang sering terjadi, merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh pengakuan diri atau respek dari pihak-pihak lain dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam keberagaman yang demikian, setiap orang harus mengakui keberadaan orang lain sehingga orang lain itu dapat memberikan pengakuan yang sama kepada diri atau kelompoknya (*reciprocal recognition*).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.² Menurut Aswani Sudjud, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.³ Dalam penelitian ini, langkah penelitian yang hendak dilakukan antara lain seperti berikut: Menemukan persamaan, perbedaan gagasan melalui tiga komponen (konsep, motivasi dan penerapan), kekhasan gagasan, dan kontribusi pemikiran tokoh untuk masyarakat.

¹ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 81.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2012), 56.

³ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 310.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif yang memuat tiga komponen, yakni pengertian, motivasi dan bentuk penerapan dari nilai pluralitas. Berikutnya, uraian data yang ada akan dibedah dengan menggunakan pisau analisis metode komparatif untuk menemukan titik temu pandangan Axel Honneth dan Mangunwijaya mengenai komponen pluralitas kemanusiaan.

Tabel 1: Pengertian, Motivasi dan Penerapan Pluralitas Kemanusiaan

Pluralitas	Pengertian	Motivasi	Penerapan
Axel Honneth	Pluralitas tidak hanya berarti adanya variasi dalam budaya, agama, atau identitas, tetapi juga berarti adanya perbedaan dalam cara manusia berinteraksi dan mengakui satu sama lain. Pluralitas harus meliputi tingkat intersubjektif, di mana manusia mengakui dan menghormati identitas lain. Pluralitas berarti adanya kesadaran dan pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan manusia.	Pengakuan (<i>recognition</i>) sebagai tujuan akhir dari perjuangan sosial. Pengakuan tidak hanya sebatas pada aspek hukum atau budaya, tetapi juga secara lebih esensial meliputi aspek emosional dan moral.	Pengakuan intersubjektif sebagai bagian dari proses pengakuan yang lebih luas yakni dalam bentuk cinta, hukum dan solidaritas sebagai fondasi bagi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya.
Y.B. Mangunwijaya	Pluralitas dibangun atas fondasi sosio-kultural kemasyarakatan. Pluralitas sebagai tugas dan komitmen (melalui teladan etis) bersama dalam upaya kemerdekaan masyarakat. Pluralitas menimbulkan kesadaran bahwa semua orang dihadapkan pada persoalan atau keprihatinan yang sama	Menciptakan perdamaian dan persaudaraan di sebuah dunia di mana tidak ada lagi penindasan dan perendahan martabat hidup manusia. Mewujudkan tanggung jawab iman (meneladani Yesus) Perjuangan untuk memerdekakan hidup identik dengan proses memanusiakan manusia: “Jadilah dulu	Persoalan kemasyarakatan tidak hanya menimpa segelintir orang yang berkebudayaan atau beragama sama, maka perjuangan kemanusiaan harus terarah kepada semua orang melampaui batas budaya-agama. Dalam masyarakat Indonesia, penghayatan iman ada dalam konteks perjuangan untuk membebaskan diri dari

	untuk membangun kehidupan.	manusia yang baik, manusia yang manusiawi, lewat kemanusiaan itulah jalan menuju ke Tuhan.”	himpitan berbagai persoalan akibat dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kehancuran lingkungan hidup. Perjuangan untuk mencapai hidup merdeka bersifat integral menyeluruh mencakup aspek material, sosial, spiritual dan segala aspek kehidupan manusia lainnya.
--	----------------------------	---	--

Pluralitas Menurut Axel Honneth

Axel Honneth tidak membedah secara khusus kajian mengenai pluralisme dan multikulturalisme. Honneth lebih melihat realitas sosial-politis yang kompleks yang dialami individu-individu dan kelompok sosial dan kebudayaan sehari-hari, terutama realitas patologisnya, namun tetap dalam dunia multikultural dan berusaha menganalisisnya dari perspektif politik pengakuan. Yang mana Honneth, melihatnya dari sudut pandang terutama sebagai masalah defisit pengakuan intersubjektif. Artinya defisit pengakuan intersubjektif, menyangkut fenomena tentang adanya suatu situasi kedamaian yang tidak memadai sebuah relasi pengakuan antar pribadi yang meliputi persoalan pengakuan kesetaraan hukum dan hak-hak (*legal order*) dan pengakuan sifat-sifat particular individu dan kelompok sosial (*solidarity*).⁴ Di mana terdapat suatu kenyataan di mana hak-hak particular individu dalam relasinya di tengah masyarakat suatu Negara tidak terakomodasi atau tidak dihargai, baik oleh sesama warga Negara maupun oleh Negara sendiri. Pengalaman tidak dihargai atau merasa ditinggalkan (*indignation*) mengantar pada apa yang Honneth sebut sebagai “*Moral Injury*” atau “luka moral” yang memuat konten normativ *struggle for recognition*.⁵ Honneth melihat pengalaman luka moral tersebut sebagai produsen konflik yang pada dasarnya berpotensi positif pada perluasan ruang-ruang pengakuan, evolusi hukum, serta perubahan sosial yang progresif.⁶

Konflik sebagai representasi dari perjuangan pengakuan kolektif, mengandung harapan agar hak-hak mereka sebagai warga negara, sebagai subjek hukum, sekaligus sebagai subjek etis

⁴ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, diterjemahkan dari Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte oleh Joel Anderson (Cambridge: The MIT Press, 1995), 39.

⁵ Honneth, *The Struggle for Recognition*., 39.

⁶ Jean-Philippe Deranty, *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy* (Leiden: Brill Publishing, 2010), 8.

dan makhluk yang otonom terpenuhi. Dengan demikian, mereka dapat merasakan suatu keadilan. Keadilan artinya mendapatkan pengakuan yang layak atas hak-hak, harkat dan martabat, kapasitas atau kemampuan, serta identitas khas mereka. Bagi Honneth sangatlah mendasar karena menyangkut rasa hormat diri dan rasa harga diri individu dan kelompok. Klaim filosofis utama Honneth ialah bahwa rasa hormat diri (*self-respect*) yang dikonkretkan melalui pengakuan atau jaminan kesetaraan hukum, dan rasa harga diri (*self-esteem*) individu yang dialami melalui pengalaman solidaritas itu terhubung secara terpisahkan dengan struktur dasar pengakuan sosial. Honneth menganalisis lebih jauh merambah hingga realitas perjuangan intersubjektif (*intersubjective recognition*), antarpribadi. Hubungannya adalah bahwa kualitas pengakuan antarpribadi yang tidak memadai – dalam arti rasa ketidakpuasan yang dialami individu-individu secara personal atas realitas pengakuan, dapat memunculkan gerakan kolektif untuk perjuangan.

Perjuangan resiprokal-intersubjektif Honneth menyajikan perspektif kritis dan normatif terhadap berbagai fenomena eksklusif sosial dari jaminan hak-hak dasar serta perlindungan hukum, di mana mereka hadir dalam kebersamaannya dengan yang lain di dalam masyarakat. Honneth sekaligus menempatkan bahasa tata bahasa moral dari kehidupan modern seperti; institusi, keluarga, hukum dan hak, demokrasi konstitusional, etika pelayanan sosial, struktur sosial-ekonomi dan politik.⁷ Perihal multikulturalisme sendiri, Honneth lebih menaruh perhatian pada persoalan perendahan dan marginalisasi budaya yang menurutnya sebagai suatu bentuk *disrespect* (penyimpangan) dari prinsip masyarakat multikultural-demokrasi.⁸ Berbicara mengenai masyarakat multikultur, tentu tidak terpisahkan dari multikulturalisme (*multi: banyak*) dan kultural (budaya) yang merupakan pandangan yang menyadari adanya fakta tentang keberagaman hidup dan pluralitas kebudayaan. Multikulturalisme mengandaikan sikap serta cara pandang seseorang yang mengedepankan pengakuan atau penerimaan atas realitas kebhinekaan, (suku, agama, ras, adat-istiadat, bahasa, subkultur, dan lain-lain) sebagai fakta substansial kehidupan masyarakat.⁹ Termasuk di dalamnya sistem-sosiokultural, nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, cara pandang, kelompok sosial, dan sistem politik yang mereka anut.

Dalam sejarah filsafat, diskursus mengenai multikulturalisme dalam kaitannya dengan pengakuan identitas budaya, sebetulnya sudah lama dipersoalkan. Lantaran perkembangan budaya yang semakin maju dan kompleks, tema ini mulai diproblematisir kembali dan mendapat

⁷ Honneth, *Freedom's Right*, 38.

⁸ Axel Honneth, "The Limits of Liberalism: On the Political-Ethical Discussion Concerning Communitarianism", dalam *The Fragmented World of the Social Essays in Social and Political Philosophy* (Albany: State University of New York, 1995), 245.

⁹ Gutmann (ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (New Jersey: Princeton University Press, 1994), 30.

ruang dalam diskusi filsafat sosial-politik kontemporer.¹⁰ Terutama ini dihubungkan dengan persoalan konsep hidup bersama di dalam masyarakat multikultural yang kerap kali menyisakan tegangan, karena mendapat tekanan dan refleksi yang berbeda-beda. Dalam masyarakat modern-kontemporer, martabat kemanusiaan yang melekat dalam diri setiap individu itulah yang membuat seseorang terhormat dan dihargai dan hal inilah yang berpengaruh pada bagaimana konstitusi memperlakukan setiap individu sebagai setara. Politik martabat manusia (*politics of human dignity*) atau politik kesetaraan (*politics of equality*) menjadi pembela utama pandangan ini.¹¹ Ciri inheren martabat kemanusiaan seseorang itu membawa implikasi pada pandangan universal bahwa meskipun seseorang datang dari latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan tata cara hidup yang berbeda-beda, dengan kapasitas atau kemampuan yang berbeda pula, mereka tetap dipandang memiliki status yang setara dengan yang lain, mereka mempunyai hak-hak yang sama dan menuntut perlakuan yang sama pula. Jadi, dua aspek penting yang diandaikan Honneth dalam masyarakat multikultural-demokratis ialah pengakuan akan kesetaraan martabat manusia dan pengakuan akan perbedaan atau solidaritas.

Di dalam pemikiran mutakhir tentang manusia, diperkenalkan gagasan tentang sang lain (*the others*), yaitu gagasan mengenai pentingnya kembali dihargai manusia sebagai anggota suku, ras, dan agama yang berbeda; sebagai kaum perempuan, sebagai kaum buruh, sebagai imigran, sebagai orang Timur, sebagai non-pribumi. Manusia ingin diakui di dalam ruang-ruang kecil kemanusiaannya, yang di dalam terminologi poststrukturalisme disebut sebagai narasi-narasi kecil.¹² Maka, secara politis dalam masyarakat multikultural-demokrasi, kebutuhan akan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu, kelompok, serta kebudayaan dengan identitas partikularnya masing-masing menjadi suatu kebutuhan yang juga secara kategoris wajib dipenuhi.

Demokrasi menurut Honneth menjadi suatu sistem yang dinilai mampu mengakomodir keberagaman dan dapat mewartakan berbagai tuntutan perjuangan pengakuan dari berbagai kelompok masyarakat. Honneth mengatakan bahwa demokrasi merupakan “ruang aktualisasi pengakuan, kehormatan, dan harga diri berupa distribusi hak-hak yang adil, baik hak partikular maupun universal, sekaligus “medan perjuangan untuk pengakuan” jika hak-hak tersebut dilanggar atau tidak teraktualisasikan dalam bentuk-bentuk hukum atau institusi yang adil”.¹³ Perwujudan hak-hak dalam pengertian ini, terhubung dengan konsep kewarganegaraan itu

¹⁰ Chung Hyun Kyung, *Struggle to be the Sun Again: Introducing Asian Women's Theology* (New York: Orbis Books, 1990), 1.

¹¹ Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, 71.

¹² Paul Cliteur, *The Secular Outlook. In Defense of Moral and Political Secularism* (Wiley- Blackwell: Oxford Publication, 2010), 2.

¹³ Honneth, *Freedom's Right*, 17.

sendiri dalam suatu komunitas politis atau pemerintahan demokratis. Konsep kewarganegaraan atau politik kewarganegaraan menyangkut adanya dua hubungan, yakni hubungan vertikal dan horizontal. Relasi vertikal menyangkut relasi antara “warga” dan “negara” yang secara konstitusional berdasarkan pada imperatif hak dan kewajiban, di mana negara wajib mengakomodasi hak-hak warga negaranya. Sementara, relasi horizontal, menyangkut hubungan antar sesama warga negara, di mana diandaikan tercipta relasi kesalingpengakuan antar mereka di ruang publik.¹⁴ Di dalam kedua relasi ini dapat dengan mudah dilihat dan dievaluasi terkait bagaimana perwujudan pengakuan itu tercipta.

Pandangan Ernest Gellner sebagaimana dirumuskan Haryatmoko berikut ini dapat membantu menerangkan hal ini, bahwa: “Bangsa terbentuk bila anggota-anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status kesetaraan mereka sama. Orientasi politik kewarganegaraan sejalan dengan konsep bangsa yang mewadahi keberagaman. Konsep bangsa, menurut Gellner mengandaikan, pertama, adanya acuan ke “budaya yang sama”, dalam arti suatu sistem gagasan, tanda, dan cara bertindak dan berkomunikasi. Maka, multikulturalisme menjadi relevan karena memberi pembatasan terhadap pengertian dasar acuan yang bisa diterima semua kelompok etnis, agama, suku; kedua, bangsa merupakan bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas anggota- anggotanya. Dalam konteks ini multikulturalisme dimaksudkan mendorong tumbuhnya identitas, solidaritas dan kohesi sosial sebagai bangsa. Ketiga, bangsa terbentuk bila anggota-anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status mereka sama. Jadi, bangsa menuntut organisasi sosial yang berdasar pada budaya inklusif sehingga memungkinkan setiap komunitas mengenali diri sebagai bagiannya”.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip fondasional masyarakat demokratis-multikultural mencakup adanya jaminan akan kesetaraan dan penghormatan akan perbedaan di mana terdapat kesadaran bahwa setiap individu maupun kelompok sosial dan kebudayaan itu mempunyai ciri khas, harkat dan martabat, serta identitasnya tersendiri yang harus dijaga kehormatannya. Kekhasan atau keunikan setiap individu maupun kelompok sosial-kebudayaan mesti dipelihara agar dapat berkembang dengan baik dan menjadi suatu nilai bagi individu atau kelompok tersebut. Tiadanya penghormatan atau pengakuan akan eksistensi, hak dan martabat, kapasitas diri, identitas khas individu atau kelompok akan dapat membawa pada berbagai macam

¹⁴ Mustaghfiroh Rahayu, “Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan: Suatu Tinjauan Kritis”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 4 no. 2, (2017): 1-18.

¹⁵ Haryatmoko, “Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik”, dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI, (22 Maret 2021); bdk. Haryatmoko, *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 80-85.

konflik, resistensi, dan pemberontakan, sebab pengalaman tersebut dinilai sebagai suatu bentuk perlakuan destruktif-diskriminatif yang merusak eksistensi, kehormatan dan harga diri individu dan kelompok.

Pluralitas Menurut Y.B. Mangunwijaya

Masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara orang pluralis dan multikulturalis untuk mengurangi kerancuan makna di antara keduanya, apakah sebenarnya berbeda atau sama antara pluralisme dan multikultural? Paham pluralisme dapat dilihat sebagai sesuatu hal yang bersifat netral atau di-nolkan, di sisi lain paham multikulturalis sendiri sudah memiliki pijakan dalam artian tidak bersifat netral, karena pada dasarnya sudah terdapat perbedaan pada nilai yang terkandung dalam suku, agama dan latar belakang ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, pluralisme secara kultur diizinkan untuk berbeda, tetapi masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk merekognisi atau mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Dari hal tersebut, pokok yang membedakan pluralisme dan multikulturalis adalah titik tolaknya.¹⁶

Dalam masyarakat multikultural, setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing dalam hidup bersama entah itu dalam perbedaan budaya, agama, dan sebagainya. Pada masyarakat pluralisme, orang-orang cenderung mengharapkan kondisi yang bersifat *equality* atau menganggap setiap individu layak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa harus melihat siapa orangnya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan multikulturalisme, di mana masyarakat multikulturalisme menyadari bahwa sebenarnya mereka berbeda, tetapi tetap melakukan afiliasi atau bersatu padu dengan sesama yang lain. Masyarakat multikultural akan tetap memiliki kebanggaan terhadap diri sendiri meskipun mereka melakukan afiliasi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya seorang tukang becak yang hidup dalam masyarakat multikultural, beliau akan selalu bangga dengan pekerjaannya dan menekuninya dengan baik.

Pendidikan pluralisme dan multikulturalisme memiliki perbedaan pandangan. Misalkan dalam lingkungan sekolah, paham pluralisme mengizinkan setiap siswa untuk membangun pola pikir mereka masing-masing dan menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk memacu daya pikir setiap siswa. Sedangkan dalam pendidikan multikulturalisme berbeda, di mana pendidikan multikulturalisme akan mengajarkan dan mengenalkan setiap siswa tentang dominasi dan subordinasi yang ada di masyarakat. Bentuk dari dominasi dan subordinasi dalam masyarakat adalah seperti seseorang yang merasa sebagai minoritas yang sangat tidak setara dengan individu-individu lain yang berbeda dengannya. Masalah minoritas demikianlah yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu pemberontakan yang bersifat masif, meskipun tidak semua karena ada

¹⁶ Y.B. Mangunwijaya, *Paradigma Baru Pendidikan Rakyat*, (Jakarta: Majalah Prisme no.7, 1980), 14.

beberapa individu yang tetap mengubah hidupnya untuk naik ke tatanan level yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal-hal ini menarik bagi Romo Mangun dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Tetapi, pluralisme bukan menjadi perbedaan mayoritas dan minoritas tetapi harus dipandang sebagai nilai yang menarik bagi hidup bermasyarakat.

Menurut Romo Mangunwijaya ada perbedaan mendasar antara religius atau religiositas dengan agama, Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa, agama hanya sebuah simbol kelembagaan, sedangkan religius lebih pada tataran isi hati, riak getaran jiwa manusia; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena sedikit menapaskan intimitas jiwa dalam arti pascal yaitu cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) kedalaman pribadi manusia.¹⁸ Totalitas berarti memberi diri seutuhnya kepada siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan ras, sebab pemberian diri yang dimaksudkan ialah dalam artian adalah rasa kemanusiaan.

Romo Mangunwijaya memandang bahwa religiositas diukur dengan hati nurani seseorang, tapi tidak semua orang mampu mencapai keadaan yang sejati, keadaan di mana hati nuraninya hidup untuk menentukan kedewasaannya dan bersikap mengukur baik atau buruk suatu tindakan. Dengan tajam Romo Mangunwijaya mengkritik bahwa agama hanyalah sebagai sarana untuk memudahkan dan mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, agama tidak mutlak adanya, tidak wajib bagi seseorang untuk mengerjakan apa yang ada di dalamnya, perilaku batinlah yang menjadi landasan manusia, kedewasaannya sendiri dalam memandang baik dan buruk akan sesuatu, itulah yang terpenting. Pandangan yang demikian ada karena dalam menuju kedewasaan, kita perlu membedakan mana yang baik dan buruk dalam bertindak. “Agama hanya sarana belaka, agar manusia lebih mudah untuk menemukan jalan ke Tuhan.

Agama selaku lembaga yang mengandung sikap manusiawi juga tidak dapat mengklaim ketaatan mutlak dari masyarakat, karena agama tidak pernah identik dengan Allah atau agama bukan ciptaan Tuhan. Maka pertanyaan religius yang terungkap dalam sastra seperti cerpen “Sepotong Kayu untuk Tuhan” menjadi pertanyaan bagi agama, apakah agama sanggup mengakui bahwa ia bukan Tuhan, tetapi hanya sebatas penolong saja agar manusia sendiri dengan bakat-bakat dan kekurangannya, dengan keyakinan yang eksistensial berusaha bertanggung jawab sendiri menuju kedewasaan dalam menentukan pilihan baik dan buruk. Oleh karena itu, manusia yang dewasa mendapatkan kesempatan dan tempat yang cukup lapang

¹⁷ Mangunwijaya, *Paradigma Baru*, 14.

¹⁸ Fouz A. Kurdi, *Menguak New Age Movement* (trj), (Jakarta, Darul Uswah : 2014), 25-26.

untuk mencari sendiri dan menemukan sendiri Rahmat yang khas dari personal agama itu sendiri.¹⁹

Romo Mangunwijaya sebagai seorang rohaniwan, ia berkeyakinan bersama banyak manusia yang berbeda di belahan dunia ini, bahwa gerakan keagamaan seperti ini adalah apa yang sekarang populer dikenal dengan “*New age Movement* (NAM), yang berusaha menerapkan *Anciant Wisdom*, yang berakar pada agama-agama Timur seperti; Hindu, Budha, Taoisme, dan lain sebagainya. Beberapa gerakan mulai bergerak secara terorganisir, misalnya di Barat dengan berdirinya banyak gerakan yang berbeda-beda. Fouz A. Kurdi, mengatakan bahwa gerakan yang pertama kali muncul adalah gerakan Transendentalisme yang mengajarkan empat hal inti. *Pertama*, hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta adalah hubungan kesatuan yang satu (wihdatul wujud), *kedua*, pengetahuan intuitif dari dalam diri, yang datang dari luar penalaran, pancaindra, dan kekuatan akal, yang datang dari ilham Gnosistik dan ilham langsung, adalah hal yang suci karena merupakan limpahan dari akal suci, *ketiga*, manusia memiliki sikap tersembunyi yang tak terbatas, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan alam metafisik yang gaib dan tanpa batas, dan *keempat*, manusia menjadi harmonis dengan alam adalah hal hidup yang terbaik.²⁰ Dari empat hal tersebut tentunya mengajak kita untuk menggunakan dengan baik akal kita untuk melakukan suatu kebaikan di tengah perbedaan di negara Indonesia.

Pembahasan

Penulis berpijak dari teori yang digaungkan oleh dua tokoh. *Pertama* adalah teori pengakuan menurut Axel Honneth tentang tiga dimensi pengakuan. Karena pengakuan dalam teori Axel Honneth, dapat dinilai sebagai reaksi terhadap sejumlah tuntutan masyarakat dunia kontemporer dengan segala kompleksitas persoalannya. Berbagai patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern baik berupa ketidakadilan dan berbagai bentuk penindasan menjadi titik awal dari konstruksi teoritisnya mengenai konsep tentang pengakuan. Menurutnya, dunia modern yang ditandai dengan aneka macam keragaman serta keunikan, baik dalam hal budaya, suku, agama, ras, adat istiadat, jenis kelamin dan juga gender, tak jarang memunculkan serangkaian konflik yang memicu terjadinya perpecahan, resistensi, dan sekaligus perjuangan.

Menurut Honneth, perjuangan untuk pengakuan menjadi tema urgen dalam diskursus politik negara demokrasi dan multikultural dewasa ini. Dalam kerangka politik pengakuan atau teori perjuangan untuk pengakuan, Honneth membagi pengakuan itu ke dalam tiga dimensi,

¹⁹ Mangunwijaya, *Paradigma Baru*, 14.

²⁰ Kurdi, *Menguak*, 26.

yakni; pertama, pengakuan cinta (*love*); kedua, pengakuan legal atau hukum (*legal order*); dan ketiga, pengakuan solidaritas (*solidarity*). Pengakuan cinta, sebagai pengakuan primer dialami subyek dalam lingkup hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pengakuan atau penerimaan awal yang layak akan keberadaan subyek dapat memunculkan rasa percaya diri minimal (*self-confidence*). Kondisi ini menjadi afirmasi positif bagi keterlibatan subyek dalam kehidupan sosial selanjutnya.

Berdasarkan pandangan Honneth mengenai pengakuan, dapat dipahami bahwa Honneth mau menunjukkan betapa pentingnya aspek pengakuan dalam upaya mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan yang menimpa subjek dalam tatanan sosial. Honneth berusaha untuk mengajukan cara pandang yang berbeda yang mencoba untuk melihat bahwa tatanan masyarakat tidak cukup hanya dibangun semata-mata atas dasar konsensus rasional, tetapi justru Honneth mengajak kita untuk bertolak lebih dalam lagi ke dalam unsur atau dimensi afektif manusia.

Dengan mengutip Wellmer, Honneth menyatakan bahwa tanpa pengalaman “mengindahkan” sesama tindakan etis politis yang kita lakukan menjadi rusak dan interpretasi kita atas dunia riil tidak berarti.²¹ Dengan demikian dari pemikiran Honneth ini dapat dipahami bahwa penekanan yang menjadi tawaran dari Honneth adalah mengenai dimensi afeksi manusia untuk membawa pengakuan terkait dengan kapasitas diri seseorang atau kelompok tertentu untuk menerima kehadiran orang lain dengan tanpa merasa diri terancam. Pengakuan sekaligus mau menunjukkan bahwa harus ada unsur penerimaan atas kenyataan pluralitas yang dimiliki pada identitas subjek.

Pengakuan sebagai sebuah gramatikal sosial adalah jalan yang harus ditaati melalui tiga poin penting sebagai bagian dari rambu-rambu jalan hidup bersama yang bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari melalui, Cinta, hak dan solidaritas. Sehingga dengan mematuhi rambu-rambu seperti yang dinyatakan di atas, maka di saat yang bersamaan pula individu atau komunitas telah menyediakan ruang perlindungan intersubjektif, sebagai kondisi yang aman, bebas dalam proses artikulasi dan realisasi hidup individu. Akhirnya dengan praktik pengakuan, otonomi dan kebebasan subjek sekali lagi diafirmasi.

Kedua, dari sisi romo Mangun. Berbicara tentang pluralisme, tentu saja tidak terlepas dari sikap toleransi maupun intoleransi. Dengan keberagaman suku, ras, agama dan budaya yang ada di Indonesia, tentu tidak menjamin kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

²¹ Axel Honneth, “Dissonance of Communicative Reason: Albrecht Wellmer and Critical Theory” trans. Reider K. Maliks dalam Axel Honneth, *Pathologies of Reason* (New York: Columbia University Press, 2009) 127.

Demi memperjuangkan suku, agama atau budaya, orang-orang tidak lagi memperjuangkan nilai kemanusiaan tetapi melihat masalah ini sebagai sesuatu yang mengancam kehidupannya.

Persoalan-persoalan yang memunculkan sikap intoleran ini, membuat kita mengenal sosok Romo Mangunwijaya yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada sila ketiga Pancasila. Artinya bahwa perbedaan ini sudah disatukan dalam Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus hidup dalam persatuan sebagai masyarakat yang memperjuangkan nilai kemanusiaan. Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa ketaatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai atau dimensi tertinggi dan terdalam dalam persatuan bangsa dan masyarakat Indonesia.²² Pemikiran Romo Mangunwijaya perlu ditanamkan dalam hati, karena hal ini, terbentuklah sikap toleransi yang diharapkan bersama bisa terwujud, semisal persahabatan, persaudaraan, saling menghargai, saling menolong bisa menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan.

Dalam memperjuangkan sikap toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan, Romo Mangunwijaya juga menekankan soal kesadaran sosial. Kesadaran sosial berarti kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermartabat. Menurutnya, kesadaran kemanusiaan yang luhur menjadikan manusia dapat menentukan dan menciptakan struktur hidup yang harmonis.²³ Sikap ini akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam melihat dan menilai suatu tindakan. Kita sadar bahwa hidup sosial lebih penting dari ajaran yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Kesadaran sosial akan membawa kita pada suatu pemahaman tentang makna hidup yang sesungguhnya yakni saling melengkapi tanpa memandang suku, ras, agama dan budaya. Sikap-sikap toleransi yang ditekankan oleh Romo Mangunwijaya tidak terlepas dari persoalan yang sering terjadi yakni perbedaan keyakinan atau agama. Setiap orang menganggap agamanya yang paling benar dan agama lain salah. Menganggap bahwa hanya melalui agamanya seseorang dapat diselamatkan. Pandangan demikianlah yang menimbulkan sikap kebencian terhadap umat beragama lain dan tidak ingin berkomunikasi dengan agama lain. Orang-orang tidak memahami lagi arti hidup beragama yang sesungguhnya.

Melihat pandangan masyarakat Indonesia tentang hidup beragama yang cukup keliru, Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa beragama yang benar adalah menghasilkan religiusitas yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memberikan diri untuk keselamatan bersama. Hidup beragama demikianlah yang mampu mengembangkan humanisme dalam religiusitas beragama,

²² Oktavia Damayanti, "Implementasi Humanisme dalam Pandangan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya: Sebuah Konsep Teologi Pembebasan di Yogyakarta" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 22.

²³ Damayanti, "Implementasi Humanisme", 24.

sehingga membuat bangsa ini semakin kuat dalam ikatan sosial-religius. Hidup beragama tidak saja melulu soal ritualnya, tetapi lebih pada tindakan sosial antar umat beragama.²⁴ Artinya bahwa kita harus mementingkan kehidupan bersama dari pada hidup pribadi atau kehidupan agama kita.

Salah satu teologi yang dikembangkan Romo Mangunwijaya adalah teologi pemerdekaan sebagai bentuk dari perjuangan kemanusiaannya. Ia mengembangkan teologi pemerdekaan karena ingin mewujudkan kehidupan bersama yang bermartabat dan manusiawi, yang ditandai dengan adanya pola-pola dan relasi hidup yang adil, solider, bersaudara dan damai.²⁵ Teologi muncul karena keprihatinannya terhadap pendidikan anak. Walau demikian, teologi ini juga berguna bagi kehidupan beragama di mana kita harus saling menolong tanpa melihat perbedaan karena yang paling penting dan utama adalah nilai kemanusiaan.

Berdasarkan beberapa persoalan seperti sikap intoleran, romo Mangun menekankan dua hal pokok agar negara menjadi dewasa secara moral. *Pertama*, Setiap pribadi harus sampai ke kedewasaan jati diri yang berbudi cerah dan bernurani bening, serta bersosialisasi saling menghormati agama dan kemajemukan sesamanya. *Kedua*, kondisi untuk memproses kedewasaan individu dimulai dari pendidikan dasar untuk memproses tiap orang menjadi diri sendiri. Maksud dari menjadi diri sendiri adalah memekarkan diri dalam bakat, kesadaran budi jernih dan nurani bening, yang semakin dimekarkan oleh kondisi struktural pendidikan pemerdekaan hingga tumbuh keberanian tulus untuk peka solider dan membela kaum kecil.²⁶

Dengan demikian, dalam mewujudkan suatu sikap toleransi kita harus mengutamakan nilai kemanusiaan. Bangsa ini akan terus berada dalam konflik apa bila perbedaan selalu dipersoalkan demi mencari kebenaran. Seperti yang dikatakan Romo Mangunwijaya, negara ini tidak akan dewasa jika perbedaan dilihat sebagai masalah dan bukan sebagai kekayaan. Maka dalam menuju negara yang dewasa, nilai kemanusiaan harus menjadi dasar ajaran bagi setiap agama. Karena hanya inilah yang mampu membaw kita pada persatuan dan kedamaian.

Komparasi Pemikiran

Dalam karya Axel Honneth, pluralitas kemanusiaan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. Honneth berpendapat bahwa pengakuan dan

²⁴ Armada Riyanto, dkk, *Berteologi Baru Untuk Indonesia*, eds, Robert P. Manik (Kanisius: Yogyakarta, 2020), 308-309.

²⁵ CB. Mulyatno, "Keutamaan Dalam Karya-karya Kemanusiaan YB. Mangunwijaya" dalam *Jurnal Teologi*, No. 2 (2013): 185-189, sebagaimana dikutip oleh Ezra Tari, "Obituari YB. Mangunwijaya" *Jurnal Teologi Kristen* 1 (2020): 171.

²⁶ Mudji Sutrisno, "Sosok Romo Mangun: Inspirasi-Inspirasi Dan Karyanya" dalam *Jurnal Seni Nasional* CIKINI No. 3 (2018), 12.

penghormatan terhadap identitas individu adalah kunci untuk memahami pluralitas kemanusiaan. Dalam pandangannya, pengakuan ini tidak hanya berupa pengakuan terhadap hak-hak individu, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Honneth juga menekankan pentingnya solidaritas dan kesadaran sosial untuk mempertahankan pluralitas kemanusiaan dan mencegah konflik sosial.

Sementara itu, Romo Mangun Wijaya, seorang teolog dan filsuf Indonesia, memiliki pandangan yang lebih fokus pada aspek spiritual dan agama dalam memahami pluralitas kemanusiaan. Dalam karyanya, Mangun Wijaya menekankan pentingnya dialog antaragama dan budaya untuk memahami dan menghormati keberagaman yang ada dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pluralitas kemanusiaan tidak hanya berupa keberagaman budaya dan agama, tetapi juga keberagaman dalam pengalaman dan pandangan hidup. Dalam sintesis keduanya, memahami makna pluralitas kemanusiaan dalam pandangan Axel Honneth dan Romo Mangun Wijaya dapat diuraikan sebagai berikut: Pengakuan dan penghormatan terhadap identitas individu dan keberagaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Pentingnya solidaritas dan kesadaran sosial untuk mempertahankan pluralitas kemanusiaan dan mencegah konflik sosial. Pentingnya dialog antaragama dan budaya untuk memahami dan menghormati keberagaman yang ada dalam masyarakat. Keberagaman dalam pengalaman dan pandangan hidup adalah bagian integral dari pluralitas kemanusiaan. Dengan demikian, memahami makna pluralitas kemanusiaan dalam pandangan Axel Honneth dan Romo Mangun Wijaya dapat diuraikan sebagai suatu proses yang memerlukan pengakuan, penghormatan, dan dialog terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat, serta kesadaran sosial dan solidaritas untuk mempertahankan pluralitas kemanusiaan dan mencegah konflik sosial.

Axel Honneth: Untuk menjelaskan hal ini, Honneth mengacu pada dua postulat mendasar, yakni antropologis dan sosiologis. Secara antropologis, manusia adalah makhluk yang selalu didorong dan dikendalikan oleh kehendak untuk memperoleh pengakuan, kehormatan, dan harga diri (*self-esteem*). Sementara secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan yang lain atau selalu membutuhkan sesamanya. Pada tingkatan tertentu, konsepsi politik martabat manusia di satu sisi dan politik diferensiasi di sisi yang lain, dapat disandingkan dengan kedua model politik pengakuan Axel Honneth, yakni rasa hormat diri (*legal order*) dan rasa harga diri (*solidarity*).²⁷ Jika rasa hormat diri (*self-respect*) pada ranah hukum memberi penekanan pada status kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu (*the politics of human dignity*), rasa harga diri (*self-esteem*) justru

²⁷ Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Perjuangan untuk Pengakuan" dalam *Majalah Basis*, no. 09-10, Tahun ke-69, 2020.,12.

menekankan keunikan dan perbedaan setiap orang. Rasa harga diri adalah pengertian yang merujuk pada kualitas yang membuat seseorang istimewa, unik dan partikular. Rasa harga diri memungkinkan seseorang memelihara dan mengembangkan identitasnya sebagai individu sehingga memperoleh relasi yang tidak terdistorsi terhadap diri sendiri.²⁸ Pemahaman dan konsepsi setiap orang terhadap dirinya tentu berbeda-beda, sesuai cita-cita, kemampuan dan idenya mengenai dirinya, dan hak itu diakomodasi dalam rasa harga diri. Individualitas dan rasa harga diri itu sangat berpaut erat.

Dalam masyarakat modern, orang yang merasa tidak mampu berkontribusi terhadap *the common good*, misalnya pengangguran, atau yang kontribusinya secara sosial dianggap rendah (misalnya pembantu rumah tangga, pekerja *cleaning service*) akan memiliki rasa harga diri yang rendah. Demikian pula kelompok atau budaya minoritas yang secara sosial dianggap sebagai “*the second class*” akan memiliki rasa harga diri yang kurang atau inferior. Gambaran ini sesungguhnya memperlihatkan suatu sifat yang mendasari rasa harga diri seseorang, yakni intersubjektif. “Orang merasa dirinya ‘berharga’ hanya kalau dia tahu bahwa dia diakui untuk kemampuan-kemampuan yang mereka sumbangkan (bagi *the common good*) dengan cara yang berbeda dari orang lain,” Honneth.²⁹

Namun demikian, sebuah komunitas politik tidak akan kokoh dan bertahan bila anggota-anggotanya menekankan keunikan masing-masing. Fakta bahwa individu-individu itu adalah anggota dari sebuah komunitas politik memperlihatkan bahwa justru dalam keunikan tersebut mereka diikat oleh sebuah nilai bersama. Inilah yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas dalam pengertian Honneth ialah sebuah kondisi sosial di mana perbedaan individu-individu itu diakui karena dianggap sama-sama memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bersama (*the common good*). “Kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat menilai dirinya sendiri sebagai individu yang berharga, adalah kondisi masyarakat yang memiliki solidaritas, atau solidaritas sosial,”³⁰

Solidaritas akan menghasilkan rasa harga diri yang baik karena sekalipun setiap orang berbeda mereka tetap saling mengakui dalam perbedaan tersebut. Persoalannya ialah bahwa, dalam masyarakat modern solidaritas terhadap perbedaan dan keunikan yang ada tersebut telah diabaikan, digilas, dan diasimilasi ke dalam identitas dominan atau mayoritas. Maka dari itu, menurut Honneth agar tidak jatuh pada sikap dominatif dibutuhkan institusi-institusi penjamin relasi sosial tersebut. Institusi penjamin solidaritas ini adalah negara karena negara melampaui segala partikularitas individu dan merangkum mereka dalam sebuah entitas komunitas politis.

²⁸ (TSR, hlm. 121)

²⁹ (TSR, hlm. 125)

³⁰ (TSR, hal. 129)

Honneth menjelaskan bahwa negara yang baik dan rasional adalah negara yang mampu menjamin pengakuan seluas mungkin bagi seluruh warganya dalam ketiga dimensi pengakuan tersebut, yakni rasa percaya diri, rasa hormat diri, dan rasa harga diri.³¹ Jadi apa yang dimaksudkan dengan solidaritas dimaksudkan sebagai tempat subjek ditempatkan dalam posisi yang tepat, sesuatu yang mendorong terbentuknya kepercayaan diri sekaligus mengembangkan kepercayaan-sosialnya dalam masyarakat. Kepercayaan-sosial secara partikular dikarakterisasi oleh masyarakat dalam perbedaan identitas mereka. Bentuk pengakuan dalam wilayah solidaritas menuntut medium sosial yang harus dapat memperlihatkan perbedaan karakteristik di antara subjek secara universal dan secara spesifik lewat hubungan intersubjektif.

Honneth menegaskan demikian bahwa, tiadanya rekognisi terhadap keunikan individu atau kelompok secara menyeluruh (universal), maka pengakuan itu tampak semata legal, akan berada dalam suatu nilai dominan tertentu. Pengakuan sejatinya tidak berkuat pada persoalan hukum saja. Dengan demikian, Honneth merumuskan solidaritas sebagai hubungan resiprokal antar subyek di mana terjadi relasi saling simpati yang konstan antar keduanya terhadap keberagaman cara hidup masing-masing secara simetris.³² Dalam relasi solidaritas yang simetris tersebut tercapailah realisasi diri karena setiap orang atau komunitas saling mengakui cara hidup yang berbeda dari sesamanya sehingga mereka mampu mengaktualisasikan diri dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Romo Mangun Wijaya: Y.B. Mangunwijaya atau yang biasa dikenal dengan Romo Mangun memiliki banyak wajah. Ia adalah pemikir, rohaniawan, arsitek, aktivis dan sastrawan sekaligus. Meski demikian, semua wajah itu disatukan oleh satu hal, yakni komitmennya terhadap kemanusiaan. Romo Mangun selalu mengharapkan agar kelak umat manusia bisa hidup dalam perdamaian dan persaudaraan; di sebuah dunia di mana tidak ada lagi penindasan dan perendahan martabat hidup manusia.

Dalam masyarakat Indonesia, penghayatan iman ada dalam konteks perjuangan untuk membebaskan diri dari himpitan berbagai persoalan akibat dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kehancuran lingkungan hidup. Maka, teologi semestinya mendorong untuk memperjuangkan hidup yang terbebas dari berbagai himpitan persoalan tersebut demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang semakin manusiawi. Perjuangan untuk mencapai hidup merdeka bersifat integral menyeluruh mencakup aspek material, sosial, spiritual dan segala aspek kehidupan manusia lainnya. Seturut teladan Yesus, Mangunwijaya meyakini bahwa

³¹ Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Perjuangan untuk Pengakuan" dalam *Majalah Basis*, no. 09-10, Tahun ke-69, 2020.,10.

³² Rustono Farady Marta, "Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth" dalam *Bricolage* Vol.4 (No. 1) : 23-25. Th. 2018

perjuangan untuk memerdekakan hidup identik dengan proses memanusiakan manusia. Dia menyatakan: “Jadilah dulu manusia yang baik, manusia yang manusiawi, lewat kemanusiawian itulah jalan menuju ke Tuhan”. Teologi pemerdakaan berorientasi pada perjuangan untuk memuliakan Allah dengan jalan mengangkat manusia atau memperjuangkan kehidupan yang lebih manusiawi.³³

Romo Mangun memilih tinggal di lembah Code sebagai bentuk solidaritasnya kepada sorang-orang yang miskin dan menderita. Pilihan untuk tinggal dekat dengan orang miskin bukanlah hobi melainkan panggilan untuk membela martabat sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang harus saling mengasihi dan menolong. Setelah lembah kali Code bersih dan tertata rapi, pada tahun 1986 Romo Mangun mulai meninggalkan Code dan memberi perhatian khusus pada korban proyek Waduk Kedung Ombo.

Bagi Romo Mangun, tugas utama menjadi imam Katolik adalah untuk meneladan “Yesus sebagai figur yang punya perhatian istimewa kepada mereka yang sakit, cacat, kusta, terbuang, dan terhina oleh masyarakat”. Tugas untuk membangun hidup yang merdeka inilah yang ia sebut sebagai tugas manusiawi yang menghantar orang kepada iman akan Allah Mahapengasih dan penyayang. Maka, perintah dari kedalaman hati nurani yang selalu ia junjung adalah: “Jadilah manusia yang baik, manusia yang manusiawi, lewat kemanusiawian itulah jalan menuju ke Tuhan”.³⁴

Konsep pluralis Romo Mangun, dibangun atas fondasi sosial-kultural kemasyarakatan. Dengan konsep pemerdakaan masyarakat, Romo Mangun memberi teladan etis terhadap persoalan kemasyarakatan yang tidak hanya menimpa segelintir orang yang berkebudayaan atau beragama sama, melainkan berjuang bagi semua orang melampaui batas religius-agama. Bagi Romo Mangun, semua orang adalah sama, di hadapkan pada persoalan atau keprihatinan yang sama untuk membangun kehidupan.

KESIMPULAN

Kehadiran agama, budaya, suku, ras, dan etnis di Indonesia telah menghasilkan keragaman dan pluralitas kehidupan berbangsa. Namun seiring berjalannya waktu keragaman dan pluralisme dipertanyakan, mana kala radikalisme dan kekerasan dengan mudahnya terjadi atas nama agam dan kepercayaanya. Maka pemikiran Axel Honneth dan Romo Mangun Wijaya sangat

³³ Mulyatno, “Keutamaan”, 185-189.

³⁴ Mulyatno, “Keutamaan”, 185-189.

membantu proses adaptasi demi membangun sikap toleransi dan kemanusiaan. Maka untuk mewujudkan suatu sikap toleransi kita harus mengutamakan nilai kemanusiaan. Bangsa ini akan terus berada dalam konflik apa bila perbedaan selalu dipersoalkan demi mencari pembenaran. Seperti yang dikatakan Romo Mangunwijaya, negara ini tidak akan dewasa jika perbedaan dilihat sebagai masalah dan bukan sebagai kekayaan. Oleh karena itu, dalam menuju negara yang dewasa, nilai kemanusiaan harus menjadi dasar ajaran bagi setiap agama karena hanya inilah yang mampu membawa kita pada persatuan dan kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armada Riyanto, dkk. *Berteologi Baru Untuk Indonesia*. Edited by Robert P. Manik. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Armada Riyanto, dkk. *Berteologi Baru Untuk Indonesia*. Edited by Robert P. Manik. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Axel Honneth. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Translated by Joel Anderson. Cambridge: The MIT Press, 1995.
- Axel Honneth. "The Limits of Liberalism: On the Political-Ethical Discussion Concerning Communitarianism." In *The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political Philosophy*, Albany: State University of New York, 1995.
- Axel Honneth. "Dissonance of Communicative Reason: Albrecht Wellmer and Critical Theory." In *Pathologies of Reason*, trans. Reider K. Maliks. New York: Columbia University Press, 2009.
- Chung Hyun Kyung. *Struggle to be the Sun Again: Introducing Asian Women's Theology*. New York: Orbis Books, 1990.
- Fouz A. Kurdi. *Menguak New Age Movement*. Jakarta: Darul Uswah, 2014.
- Gutmann, ed. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat*. Jakarta: Gramedia, 2010.

- Haryatmoko. "Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik." In *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI*, March 22, 2021. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. See also *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jean-Philippe Deranty. *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy*. Leiden: Brill Publishing, 2010.
- Oktavia Damayanti. *Implementasi Humanisme Dalam Pandangan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya: Sebuah Konsep Teologi Pembebasan di Yogyakarta*. Bachelor thesis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Paul Cliteur. *The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikonto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Will Kymlicka. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Y.B. Mangunwijaya. *Paradigma Baru Pendidikan Rakyat*. Jakarta: Majalah Prisme, 1980.

Jurnal

- CB. Mulyatno. "Keutamaan Dalam Karya-karya Kemanusiaan YB. Mangunwijaya." *Jurnal Teologi* 2 (2013): 185-189. Quoted in Ezra Tari, "Obituari YB. Mangunwijaya." *Jurnal Teologi Kristen* 1 (2020): 171.
- Fitzgerald Kennedy Sitorus. "Perjuangan untuk Pengakuan." *Majalah Basis*, no. 09-10, Tahun ke-69 (2020): 12.
- Mudji Sutrisno. "Sosok Romo Mangun: Inspirasi-Inspirasi Dan Karyanya." *Jurnal Seni Nasional CIKINI* 3 (2018): 12.
- Mustaghfiroh Rahayu. "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 1-18.

Rustono Farady Marta. "Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth." *Bricolage* 4, no. 1 (2018): 23-25.